

NASKAH ORISINAL

Penguatan Kelembagaan Petani dalam Mendukung Pengembangan Kelapa Sawit di Kawasan Transmigrasi Harus Muda Jaya

Ima Dwitawati¹ | Fathya Miyagi¹ | Andhini Shafa Isnaini¹ | Khaira Khirnica³ | Rahmad Syah Putra² | Setiyo Gunawan^{1,4,*}

¹Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya 60111, Indonesia.

²Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, Indonesia.

³Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Indonesia.

⁴Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS), Jawa Timur, Indonesia.

Korespondensi

*Setiyo Gunawan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Indonesia.
Alamat e-mail: setiyo.gunawan@its.ac.id

Alamat

Departemen Teknik Kimia, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Indonesia.

Abstrak

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan mempelajari gambaran menyeluruh mengenai desain pengembangan komoditas unggulan spesifik pada kawasan transmigrasi yang berlokasi di Harus Muda Jaya, Bireuen, Aceh. Program dilakukan melalui kolaborasi multipihak yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah, akademisi, ulama, asosiasi, pelaku usaha, dan masyarakat. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa Kawasan Transmigrasi Harus Muda Jaya ditetapkan sebagai lokus prioritas pengembangan kelapa sawit karena memiliki kesesuaian lahan yang tinggi, akses terhadap pasar dan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) regional, serta masyarakat transmigran yang aktif. Kelapa sawit telah menjadi sumber utama pendapatan rumah tangga di Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) Cot Kruet, UPT Lhok Tanoh atau Krueng Meuseugob, dan UPT Bukit Cerana, didukung oleh kondisi biofisik yang memadai seperti curah hujan stabil, topografi datar, dan tanah yang sesuai. Meskipun demikian, kawasan ini masih menghadapi tantangan berupa penjualan Tandan Buah Segar (TBS) dalam bentuk mentah, ketergantungan pada pengepul, keterbatasan sarana irigasi dan jalan produksi, serta risiko iklim yang semakin meningkat. Arah pengembangan kawasan dimulai dari penguatan kelembagaan petani melalui peningkatan kapasitas kelompok tani, koperasi, dan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG). Penguatan ini menjadi prasyarat agar kelembagaan mampu bermitra secara setara dengan PKS, mengelola pemasaran secara langsung, dan menata tata niaga TBS dengan lebih transparan.

Kata Kunci:

Bireuen, Harus Muda Jaya, Kelapa Sawit, Kelembagaan Petani, Komoditas Unggulan.

1 | PENDAHULUAN

1.1 | Latar Belakang

Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi syariah dan industri produk halal yang terus mengalami pertumbuhan signifikan^[1]. Di lain sisi, disparitas pembangunan wilayah masih menjadi tantangan utama dengan ketimpangan penduduk yang sangat tinggi di Pulau Jawa dibandingkan dengan wilayah luar Jawa. Kebijakan transmigrasi dipandang strategis untuk mengatasi tekanan demografis sekaligus membuka wilayah baru sebagai basis ekonomi alternatif. Studi terkini menekankan perlunya integrasi pengembangan ekonomi syariah, termasuk produk halal, ke dalam skema pembangunan wilayah transmigrasi agar potensi tersebut dapat dimaksimalkan dalam kerangka keberlanjutan sosial dan ekonomi^[2]. Pertumbuhan industri halal dan ekonomi syariah membuka peluang ekonomi yang berkelanjutan sekaligus sejalan dengan nilai-nilai sosial budaya mayoritas penduduk di kawasan transmigrasi yang mayoritas muslim. Namun, kompleksitas sosial budaya, seperti konflik antar kelompok penduduk, dan permasalahan ekologis akibat pembukaan lahan, masih menjadi tantangan serius^[3]. Oleh sebab itu, pengembangan kawasan transmigrasi yang memasukkan aspek industri produk halal dan ekonomi syariah memerlukan pendekatan multidimensional, dengan melibatkan peserta transmigran, penduduk lokal, dan pelaku bisnis halal dalam sebuah ekosistem yang sinergis.

Masalah mendasar dalam pengelolaan transmigrasi berkenaan dengan ketimpangan manfaat ekonomi, konflik sosial, dan dampak lingkungan, yang kerap menghambat keberlanjutan program transmigrasi. Pendekatan yang selama ini lebih terpusat pada pemindahan penduduk dan pembukaan lahan kurang memperhatikan pengembangan sektor ekonomi yang berbasis nilai tambah, seperti industri halal yang potensial untuk dikembangkan di kawasan tersebut. Keterbatasan inklusi industri halal dan ekonomi syariah mengakibatkan rendahnya optimalisasi peluang ekonomi yang seharusnya dapat menopang keberlanjutan sosial dan lingkungan. Berbagai reformasi kebijakan transmigrasi mulai membuka ruang bagi pengembangan komoditas unggulan yang ramah lingkungan dan sesuai dengan kebutuhan pasar, termasuk komoditas yang terkait dengan produksi halal. Dalam perspektif ekonomi syariah, pengembangan produk halal tidak hanya sebagai upaya komersialisasi, tetapi juga pemberdayaan ekonomi lokal melalui sistem ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Pendekatan ini diharapkan dapat mengurangi ketimpangan ekonomi dan meningkatkan inklusi sosial di kawasan transmigrasi.

Dalam konteks pengembangan wilayah transmigrasi, penting untuk mendesain kawasan yang berorientasi pada potensi lokal dan nilai kultural masyarakat dengan mengintegrasikan industri halal sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Selain itu, integrasi perencanaan lingkungan yang menjaga kelestarian sumber daya alam penting untuk mendukung keberlanjutan ekosistem produksi halal. Sinergi antara aspek sosial, ekologis, dan ekonomi syariah dalam pengembangan kawasan dapat memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat transmigran dan penduduk lokal.

Kebaruan dari kegiatan ini terletak pada pendekatan desain komoditas unggulan yang bersifat integratif. Berbeda dengan program pengabdian atau riset transmigrasi di wilayah lain di tahun-tahun yang lalu, yang umumnya masih berfokus pada aspek teknis budidaya pertanian secara parsial atau bantuan sarana prasarana fisik semata^[4], kegiatan di kawasan transmigrasi Harus Muda Jaya, kabupaten Bireuen, provinsi Aceh ini menawarkan model penguatan kelembagaan yang mensinergikan tata kelola perkebunan kelapa sawit dengan ekosistem ekonomi syariah. Walaupun literatur telah menunjukkan potensi besar pengembangan ekonomi syariah dan produksi halal, penelitian empiris yang menghubungkan desain pengembangan komoditas unggulan halal dengan dinamika sosial dan keberlanjutan lingkungan pada kawasan transmigrasi, khususnya di Harus Muda Jaya, Bireuen, Aceh, masih sangat terbatas. Kebanyakan kajian masih bersifat umum dan belum mendalami bagaimana ekosistem ekonomi syariah dapat dioperasionalkan secara nyata dalam kawasan dengan karakteristik sosial dan ekologis yang kompleks tersebut. Oleh karena itu, kegiatan yang mengkaji secara mendalam integrasi industri halal dengan pengembangan kawasan transmigrasi menjadi sangat penting.

Kegiatan ini bertujuan untuk menganalisis model pengembangan kawasan transmigrasi melalui pendekatan desain komoditas unggulan berbasis ekonomi syariah dan industri produk halal di Harus Muda Jaya, Bireuen, Aceh. Studi ini diharapkan memberikan perspektif integratif yang mampu mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan secara simultan. Melalui pendekatan kualitatif-empiris, kegiatan ini akan menawarkan rekomendasi kebijakan kontekstual yang mendorong pengelolaan ruang yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan dengan menitikberatkan pada penguatan ekosistem ekonomi syariah. Hasilnya diharapkan dapat menjadi landasan pengembangan kebijakan transmigrasi yang efektif, berkelanjutan, dan responsif terhadap peluang serta tantangan lokal.

Secara spesifik, integrasi kelapa sawit dalam ekosistem industri halal di kawasan ini diwujudkan melalui optimalisasi pemanfaatan produk turunan sawit sebagai bahan baku pangan yang memenuhi standar *halalan toyyiban* guna menjamin integritas rantai pasok halal dari hulu. Selain itu, penguatan kelembagaan petani diarahkan pada penerapan tata kelola berbasis skema kemitraan bagi hasil (*profit-loss sharing*) dan akad-akad syariah yang transparan untuk memastikan keadilan ekonomi bagi masyarakat transmigran.

1.2 | Solusi Permasalahan atau Strategi Kegiatan

Mengingat kompleksitas tantangan di Harus Muda Jaya, kegiatan pengabdian ini menawarkan solusi berupa pengembangan desain model kawasan berbasis data empiris. Strategi utama yang dilakukan adalah pemetaan komprehensif terhadap potensi dan hambatan di UPT Cot Kruet, Lhok Tanoh, dan Bukit Cerana guna menghasilkan rekomendasi penguatan kelembagaan yang kontekstual. Penyusunan basis data yang akurat mengenai profil petani dan rantai pasok merupakan langkah fundamental dalam memastikan integritas dan efisiensi industri kelapa sawit di masa depan^[5]. Dengan data yang valid, intervensi kebijakan selanjutnya dapat dilakukan secara lebih presisi.

Selanjutnya, kegiatan ini diarahkan pada identifikasi skema kemitraan yang potensial antara masyarakat transmigran dengan pelaku industri lokal seperti PT Syaukath Sejahtera dan PT Blang Ketumba. Solusi ini berupaya membedah model kerja sama yang berkeadilan dan inklusif, yang dalam perspektif ekonomi syariah menekankan pada keseimbangan manfaat. Pemetaan inklusi keuangan dan ekonomi pada tahap awal sangat krusial untuk menentukan instrumen pemberdayaan yang tepat bagi masyarakat di wilayah tertinggal^[6]. Hasil identifikasi ini akan menjadi landasan untuk membangun sistem tata niaga kelapa sawit yang lebih transparan dan berpihak pada petani.

Sebagai bagian dari keberlanjutan, strategi pengabdian ini juga mencakup analisis kesesuaian tata kelola lingkungan berdasarkan prinsip *Green Agriculture*. Penilaian awal terhadap praktik budidaya yang dilakukan masyarakat penting untuk memastikan bahwa pengembangan ekonomi tidak mengabaikan kelestarian sumber daya alam. Hal ini selaras dengan integrasi etika moralitas dalam perlindungan ekosistem yang menjadi pilar keberlanjutan wilayah^[7]. Terakhir, kegiatan ini menawarkan strategi digitalisasi data awal sebagai prototipe sistem keterlacakan (*traceability*) produk. Penggunaan sistem data yang terorganisir sejak tahap awal terbukti dapat meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi manajemen rantai pasok dalam jangka panjang^[8].

1.3 | Target Luaran

Target luaran utama dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah dihasilkannya sebuah Dokumen Rekomendasi Strategis dan Desain Pengembangan Kawasan Transmigrasi Harus Muda Jaya. Dokumen ini berfungsi sebagai instrumen rujukan teknis yang menyajikan basis data akurat mengenai profil geografis, demografi, serta riwayat kawasan di UPT Cot Kruet, Lhok Tanoh, dan Bukit Cerana. Di dalamnya, terangkum secara sistematis identifikasi komoditas unggulan kelapa sawit, analisis kontribusi ekonominya terhadap kesejahteraan lokal, serta pemetaan struktur rantai nilai (*value chain*) dari hulu hingga ke hilir. Penyusunan dokumen ini menjadi krusial untuk memberikan gambaran objektif mengenai titik-titik kritis dalam rantai pasok yang selama ini menghambat posisi tawar petani transmigran.

Selain itu, dokumen luaran ini memuat analisis mendalam terkait potensi pasar, kelayakan ekonomi awal, serta tantangan logistik yang dihadapi dalam distribusi TBS ke PKS regional. Melalui sintesis temuan lapangan yang diperoleh dari survei primer dan FGD, dokumen ini menyajikan analisis SWOT serta usulan program peningkatan kapasitas kelembagaan petani yang dikaitkan dengan peluang investasi dan kesiapan hilirisasi. Seluruh informasi dalam dokumen ini diproyeksikan menjadi landasan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan pembangunan kawasan yang inklusif, berkelanjutan, dan responsif terhadap dinamika pasar.

2 | TINJAUAN PUSTAKA

2.1 | Paradigma Pembangunan Kawasan Transmigrasi

Pembangunan kawasan transmigrasi di Indonesia telah mengalami pergeseran dari pendekatan pemindahan demografis menuju strategi pengembangan ekonomi wilayah yang terintegrasi. Paradigma baru ini menekankan pada pembentukan pusat pertumbuhan melalui optimalisasi potensi lokal yang selaras dengan daya dukung lingkungan. Keberhasilan pembangunan di pedesaan, termasuk juga transmigrasi kontemporer sangat bergantung pada kemampuannya mengintegrasikan aspek keadilan sosial dengan

struktur ekonomi nasional yang lebih luas^[9]. Hal ini sejalan dengan teori *Community Capacity Building* yang menekankan pentingnya penguatan kapasitas lokal untuk menciptakan perubahan komunitas yang berkelanjutan melalui perencanaan program yang terukur^[10].

2.2 | Inklusi Ekonomi Syariah dan Industri Halal

Integrasi ekonomi syariah dalam pengembangan kawasan dipandang sebagai instrumen strategis untuk mencapai pertumbuhan yang inklusif. Menurut laporan OJK (2023) dan Islamiati & Winarto (2025), sektor keuangan dan ekonomi syariah di Indonesia terus menunjukkan resiliensi yang tinggi dalam mendukung stabilitas ekonomi nasional^{[1][2]}. Dalam konteks industri halal, pengembangan komoditas tidak hanya berorientasi pada kepatuhan ritualitas (halal), tetapi juga aspek kualitas dan kebaikan (*thayyip*). Implementasi standar industri halal pada rantai pasok komoditas unggulan dapat meningkatkan kepercayaan pasar global dan memperkuat identitas ekonomi wilayah yang memiliki karakteristik religiusitas kuat seperti Aceh.

2.3 | Rantai Pasok Kelapa Sawit Berbasis Syariah

Kelapa sawit merupakan komoditas strategis yang memerlukan manajemen rantai pasok hulu-hilir yang transparan. Tantangan utama petani sering kali terletak pada ketergantungan data dan rendahnya posisi tawar. Penggunaan analisis data sekunder dalam memetakan dinamika pasar sangat krusial untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan strategis mengenai efisiensi distribusi^[11]. Dalam perspektif syariah, rantai pasok sawit diarahkan pada penghapusan praktik spekulasi dan ketidakpastian (*gharar*) dalam penentuan harga TBS. Transformasi menuju industri sawit yang berkelanjutan menuntut adanya sinkronisasi antara etika bisnis Islam dengan standar keberlanjutan lingkungan guna menjamin keberlangsungan ekosistem produksi.

2.4 | Penguatan Kelembagaan Petani dan Model Kemitraan

Kelembagaan petani merupakan pilar utama dalam mendukung posisi tawar masyarakat di kawasan transmigrasi. Kelembagaan yang profesional, seperti koperasi syariah, berfungsi sebagai wadah kolektif untuk memitigasi risiko pasar dan meningkatkan efisiensi operasional. Model kemitraan yang ideal adalah yang berbasis pada prinsip bagi hasil (*profit-loss sharing*) yang berkeadilan. Keberlanjutan kelembagaan ini sangat bergantung pada dukungan multipihak yang mampu memberikan pendampingan teknis dan manajerial secara berkelanjutan, sehingga petani tidak hanya menjadi objek produksi, tetapi juga aktor utama dalam rantai nilai komoditas.

3 | METODE KEGIATAN

3.1 | Pembekalan Tim Ekspedisi Patriot (TEP)

Tim Ekspedisi Patriot (TEP) terdiri atas 1 dosen dengan kualifikasi doktor (S3), 3 alumni strata satu (S1), dan 1 mahasiswa yang masih aktif (*on going*). Pembekalan TEP diselenggarakan secara terpusat oleh Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi, Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia pada tanggal 24–25 Agustus 2025 di Jakarta.

3.2 | Koordinasi dengan Lembaga Terkait

Dalam memastikan efektivitas pelaksanaan kegiatan Tim Ekspedisi Patriot di lapangan, koordinasi lintas pihak dan keterlibatan *stakeholder* menjadi aspek krusial dalam seluruh tahapan pelaksanaan program. Koordinasi dilakukan secara sistematis dengan berbagai pihak yang memiliki peran strategis, baik di tingkat pusat, daerah, maupun komunitas lokal. Dalam melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat ini, berkolaborasi dan bersinergi dengan seluruh *stakeholder* terkait yang melibatkan pemerintah provinsi Aceh, pemerintah kota Bireuen, Pengurus Wilayah Ikatan Alumni ITS Aceh, dan Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Aceh.

3.3 | Pengumpulan Data

Seleksi Metode pengumpulan data dalam kegiatan TEP ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu pengumpulan data secara primer dan sekunder.

a. Pengumpulan Data Primer

1) Wawancara Mendalam (*In-Depth Interview/IDI*)

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data komprehensif mengenai pengalaman, persepsi, dan pengetahuan peserta di lapangan. Pendekatan ini memungkinkan eksplorasi tema secara mendalam guna memperoleh data kualitatif yang kaya dan kontekstual relevan dengan pengembangan komoditas unggulan di kawasan transmigrasi.

Pemilihan informan dilakukan secara sengaja (*purposive sampling*) untuk memastikan keterwakilan seluruh pemangku kepentingan dalam ekosistem kelapa sawit di Harus Muda Jaya. Informan dalam kegiatan ada sebanyak 40, mereka terdiri dari 6 tokoh masyarakat yang memahami sejarah dan dinamika sosial kawasan, 4 perangkat desa sebagai representasi otoritas lokal, serta 10 pelaku usaha untuk memotret aktivitas ekonomi di tingkat tapak. Selain itu, perspektif kolektif diperoleh melalui wawancara dengan 3 organisasi komunitas dan koordinasi teknis dengan 15 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait guna menyalurkan temuan lapangan dengan kebijakan makro pemerintah daerah. Guna melengkapi data rantai pasok dari sisi industri, wawancara juga dilakukan dengan 2 orang informan dari PKS regional.

Data yang diperoleh dari IDI ini kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi pola-pola kunci terkait hambatan kelembagaan dan potensi hilirisasi komoditas. Proses ini krusial untuk menghasilkan rekomendasi yang tidak hanya berbasis data statistik, tetapi juga berpijak pada realitas sosiologis dan aspirasi masyarakat transmigran. Integrasi berbagai sudut pandang informan ini menjamin validitas data melalui teknik triangulasi sumber, sehingga potret mengenai penguatan kelembagaan petani di Harus Muda Jaya dapat tergambar secara holistik.

2) Diskusi Kelompok Terarah/ *Focus Group Discussion* (FGD)

Metode FGD banyak digunakan dalam ilmu sosial dan manajemen untuk memperoleh berbagai perspektif dari kelompok peserta yang terlibat^[12]. FGD juga efektif untuk mengeksplorasi dinamika sosial dan mengidentifikasi kebutuhan masyarakat serta potensi pengembangan komoditas unggulan secara kolektif. Dalam kegiatan ini, FGD diselenggarakan sebagai instrumen untuk mensinkronkan data hasil wawancara mendalam dengan kebijakan serta aspirasi dari berbagai lini pemangku kepentingan.

Pelaksanaan FGD melibatkan 50 orang peserta yang merepresentasikan elemen pengambil kebijakan dan pelaksana lapangan di Kabupaten Bireuen. Komposisi peserta terdiri dari pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, pimpinan Unit Permukiman Transmigrasi (UPT), Kepala Desa, serta Camat dari Kecamatan Peudada dan Kecamatan Simpang Mamplam. Pelibatan lintas sektor ini bertujuan untuk membangun konsensus strategis mengenai peta jalan (*roadmap*) pengembangan kelapa sawit di kawasan Harus Muda Jaya.

Melalui diskusi ini, dilakukan identifikasi titik-titik kritis dalam rantai nilai komoditas serta perumusan langkah-langkah penguatan kelembagaan petani yang adaptif terhadap karakteristik wilayah transmigrasi. Diskusi ini juga difokuskan untuk menggali potensi integrasi ekonomi syariah dalam tata kelola kelembagaan lokal agar tercipta ekosistem industri halal yang berkelanjutan. Hasil FGD ini menjadi data primer krusial yang melengkapi analisis kelayakan ekonomi dan rekomendasi kebijakan yang akan diusulkan.

b. Pengumpulan Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui studi literatur atau *desk study*, yaitu pencarian dan analisis dokumen-dokumen terkait kebijakan transmigrasi, data statistik, serta kajian ilmiah yang relevan^[13]. Studi literatur merupakan tahap penting sebagai landasan teoritis dan pembandingan hasil temuan lapangan^[14].

3.4 | Analisa Data

Analisis data pada kajian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola, tema, serta hubungan antar variabel dalam pengembangan komoditas unggulan di kawasan transmigrasi. Proses analisis mengikuti tahapan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi kesimpulan^[10]. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman mendalam terhadap konteks unik wilayah transmigrasi yang menjadi fokus studi dan mendukung perumusan rekomendasi yang aplikatif dan berkelanjutan.

4 | HASIL DAN DISKUSI

Secara historis, transmigrasi di Indonesia mengalami evolusi paradigma dari kolonisasi kolonial, integrasi nasional, pembangunan massal, hingga pembangunan berkelanjutan (Tabel 1). Perubahan ini mencerminkan dinamika politik, ekonomi, dan sosial yang melingkupi kebijakan transmigrasi. Sejarah transmigrasi di Indonesia menunjukkan bahwa kebijakan ini merupakan cerminan dari visi negara terhadap pembangunan dan pengelolaan wilayah. Transformasi transmigrasi dari instrumen kolonial menjadi kebijakan pembangunan berkelanjutan yang dikelola oleh kementerian tersendiri menandai perubahan paradigma yang signifikan. Ke depan, keberlanjutan transmigrasi sangat bergantung pada kemampuannya untuk mengintegrasikan keadilan sosial, pengakuan hak masyarakat adat, dan keberlanjutan lingkungan dalam kerangka pembangunan nasional.

Tabel 1 Ringkasan Integratif Perkembangan Transmigrasi di Indonesia

Periode Historis	Kerangka Ideologis & Tujuan Utama	Kelembagaan Pengelola	Pendekatan Kebijakan	Dampak Utama
Kolonial Belanda (1905–1942)	Stabilitas kolonial, penyediaan tenaga kerja, pengurangan kepadatan Jawa	Pemerintah Hindia Belanda	Kolonisasi (<i>kolonisatie</i>), top-down, agraris	Pembukaan wilayah baru (Lampung), eksploitasi penduduk, pengabaian hak adat
Awal Kemerdekaan (1945–1960)	Integrasi nasional, pemerataan penduduk, simbol kedaulatan	Kementerian Sosial & Dalam Negeri	Terbatas dan sporadis	Skala kecil, legitimasi ideologis tinggi namun implementasi lemah
Orde Lama (1960–1965)	<i>Nation building</i> , konsolidasi wilayah	Pemerintah pusat	Normatif dan politis	Transmigrasi belum berkembang signifikan akibat krisis ekonomi
Orde Baru (1966–1998)	Pembangunan nasional, stabilitas politik, swasembada pangan	Departemen Transmigrasi	Massal, terpusat, berbasis pertanian	Pembukaan kawasan luas, konflik agraria, deforestasi, kolonialisme internal
Reformasi Awal (1999–2010)	Demokratisasi, HAM, desentralisasi	Multi-sektor (tidak terfokus)	Reorientasi & pengurangan skala	Krisis legitimasi, penolakan daerah, evaluasi kebijakan
Era Kon-temporer (2011–2024)	Pembangunan berkelanjutan, kawasan, SDGs	Kemendes PDTT	Berbasis kawasan, partisipatif, selektif	Integrasi desa–kawasan, penguatan ekonomi lokal, tantangan keberlanjutan
Bersambung ke halaman berikutnya...				

Tabel 1 – Sambungan dari halaman sebelumnya

Periode Historis	Kerangka Ideologis & Tujuan Utama	Kelembagaan Pengelola	Pendekatan Kebijakan	Dampak Utama
Era Baru (Oktober 2024 – sekarang)	Langkah strategis dalam pemerataan pembangunan dan kesejahteraan sosial.	Kementrans RI	Pembangunan kawasan produktif sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui penguatan ekonomi lokal, peningkatan kualitas SDM, integrasi infrastruktur, serta kolaborasi multisektor untuk pemerataan kesejahteraan dan pertumbuhan wilayah berkelanjutan.	Terbentuknya pusat-pusat ekonomi baru yang meningkatkan pendapatan, akses pendidikan, kesejahteraan masyarakat, mengurangi kesenjangan wilayah, serta memperkuat ketahanan ekonomi.

4.1 | Pembekalan Tim Ekspedisi Patriot

Kegiatan pembekalan tersebut bertujuan untuk menyamakan persepsi, memahami konteks dan kebijakan terkini terkait transmigrasi, serta mempersiapkan tim dalam pelaksanaan tugas di lapangan secara optimal (Gambar 1). Pembekalan formal seperti ini selaras dengan praktik penguatan kapasitas tim penelitian dan pengabdian masyarakat guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan program^[10]. Kabupaten Bireuen merupakan salah satu dari 23 kabupaten di Provinsi Aceh yang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tanggal 12 Oktober 1999 sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Utara. Kabupaten ini memiliki posisi yang strategis karena dilintasi oleh jalan nasional lintas Sumatera dan diapit oleh beberapa kabupaten lain, sehingga berperan sebagai pusat perdagangan dan distribusi di kawasan pantai timur Aceh. Luas wilayah Kabupaten Bireuen adalah 179.844,80 hektar atau 3,40 persen dari luas wilayah Provinsi Aceh. Secara administrasi Kabupaten Bireuen terdiri atas 17 Kecamatan, dan 609 Gampong (desa). Jarak tempuh dari ibu kota kabupaten ke kota-kota kecamatan di Kabupaten Bireuen bervariasi, dengan jarak rata-rata sekitar 20 km. Kecamatan yang letaknya paling jauh dari ibu kota kabupaten adalah Kecamatan Samalanga, dengan jarak tempuh mencapai 36 km.



Gambar 1 Kegiatan pembekalan tim ekspedisi patriot. Ketua tim ekspedisi patriot ITS (a), Tim lengkap ekspedisi patriot ITS (b).

4.2 | Koordinasi dengan Lembaga Terkait

Pelaksanaan program transmigrasi membutuhkan sinergi yang kuat antara berbagai pemangku kepentingan untuk menjamin keberhasilan dan keberlanjutan pembangunan kawasan transmigrasi. Dalam konteks ini, Tim Ekspedisi Patriot (TEP) memegang

peranan strategis dengan tugas untuk membangun kolaborasi efektif melalui mekanisme kemitraan yang melibatkan pemerintah daerah, perguruan tinggi, penerima beasiswa, serta masyarakat lokal (Gambar 2). Pendekatan kolaboratif ini tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga mengakomodasi dinamika sosial, ekonomi, dan budaya yang ada di lapangan, sehingga dapat menghasilkan program yang inklusif dan berkelanjutan. Pertama, kerja sama dengan pemerintah daerah merupakan fondasi utama dalam membangun kolaborasi TEP. Pemetaan potensi daerah secara bersama menjadi langkah awal yang esensial untuk mengidentifikasi sumber daya alam dan sosial ekonomi yang ada serta potensi pengembangan komoditas unggulan. Pemetaan ini memungkinkan perencanaan yang berbasis data dan disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik lokal. Selanjutnya, integrasi dengan program pembangunan daerah menjamin keselarasan agenda dan pemanfaatan sumber daya secara optimal sehingga kegiatan TEP dapat mendukung target-target pembangunan yang telah dicanangkan oleh pemerintah daerah. Pemanfaatan data dan sumber daya daerah secara sinergis semakin memperkuat kapasitas pelaksanaan program, mempercepat realisasi *output*, dan menghindari duplikasi usaha.

Kedua, kerja sama dengan perguruan tinggi berperan dalam memperkuat aspek edukasi dan riset di kawasan transmigrasi. Penempatan mahasiswa magang dan KKN di lokasi transmigrasi merupakan strategi efektif untuk menghubungkan kajian akademik dengan praktik lapangan serta memberikan kontribusi langsung pada pembangunan masyarakat di sana. Pelibatan dosen sebagai *supervisor* riset di lapangan berfungsi untuk menjaga kualitas riset dan memastikan relevansi hasil kajian dengan kebutuhan program. Selain itu, pengembangan kurikulum berbasis kawasan transmigrasi memperkuat pengetahuan dan kompetensi mahasiswa dalam konteks pembangunan wilayah yang spesifik, sehingga mendukung regenerasi sumber daya manusia profesional yang memahami isu-isu transmigrasi secara komprehensif.



(a)



(b)

Gambar 2 Kegiatan koordinasi tim ekspedisi patriot dengan lembaga terkait. UIN Ar-Raniry Banda Aceh (a), Pemerintah Kabupaten (b).

Ketiga, sinergi dengan penerima Beasiswa Patriot juga menjadi komponen penting dalam struktur kolaborasi TEP. Dalam hal ini, TEP tidak hanya bertindak sebagai pelaksana program tetapi juga sebagai mentor lapangan bagi mahasiswa penerima beasiswa. Pendampingan ini memperkuat kemampuan mahasiswa dalam mengaplikasikan pengetahuan akademik pada kondisi nyata di lapangan serta memperkaya pengalaman praktis mereka. Pengembangan proyek bersama antara TEP dan penerima beasiswa membuka peluang kolaborasi riset yang saling mendukung dan berorientasi pada hasil yang aplikatif. Desain riset yang dirancang secara kolaboratif selanjutnya dapat menjadi bahan pembelajaran lapangan yang bermanfaat untuk kepentingan akademik dan pembangunan kawasan.

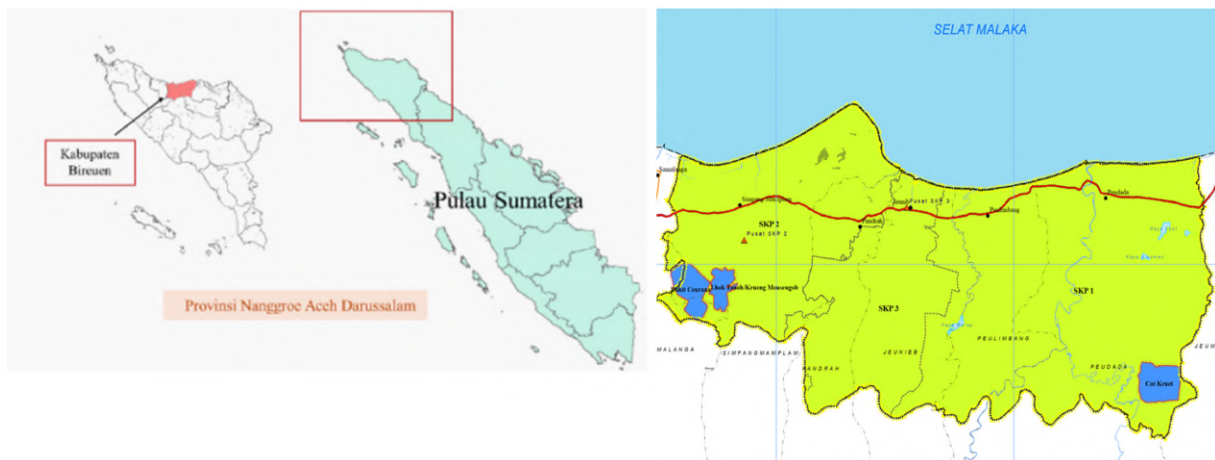
Terakhir, pelibatan masyarakat lokal menegaskan pentingnya pendekatan partisipatif guna memastikan program lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Pelatihan metode riset partisipatif bagi tokoh masyarakat merupakan alat pemberdayaan yang memungkinkan masyarakat aktif berkontribusi dalam proses pengumpulan dan analisis data. Pendekatan partisipatif ini juga mendukung terciptanya *sense of ownership* terhadap program transmigrasi. Selain itu, forum rutin untuk berbagi temuan dengan masyarakat menjadi sarana penting dalam menjalin komunikasi dua arah, membangun transparansi, dan mengakomodasi masukan masyarakat agar kegiatan yang dilaksanakan tetap relevan serta berdampak positif.

Secara keseluruhan, mekanisme kolaborasi yang dijalankan oleh Tim Ekspedisi Patriot mencerminkan pendekatan pembangunan yang holistik dan inklusif yang mengintegrasikan berbagai sumber daya dan kapasitas. Pendekatan ini bukan hanya memperkuat kapasitas teknis dan kelembagaan, tetapi juga memperkaya proses sosial yang mendukung keberlanjutan, harmonisasi antar *stakeholder*, dan pemberdayaan masyarakat di kawasan transmigrasi.

4.3 | Survey Lapangan

Kabupaten Bireuen memiliki 1 kawasan transmigrasi, yaitu Kawasan Harus Muda Jaya di Kabupaten Bireuen. Kawasan Transmigrasi Harus Muda Jaya ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2017 tentang Penetapan Kawasan Transmigrasi. Sistem Informasi Peta Terpadu Kawasan Transmigrasi (SIPUKAT), Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia, Kawasan Transmigrasi Harus Muda Jaya memiliki luas sebesar 33.728,43 Ha. Kawasan ini terletak di 6 kecamatan dengan total 203 desa, yaitu Kecamatan Samalanga, Kecamatan Simpang Mamplam, Kecamatan Pandrah, Kecamatan Jeunieb, Kecamatan Peulimbang, dan Kecamatan Peudada^[15].

Kawasan Transmigrasi Harus Muda Jaya terbagi menjadi 3 Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) seperti yang terlihat di Gambar 3. SKP 1 terletak di Kecamatan Jeunieb, Kecamatan Peulimbang, dan Kecamatan Peudada dengan luas 7.765,66 Ha. SKP 1 terdiri atas 7 desa yang terletak di Kecamatan Jeunieb dengan semua desa berstatus tertinggal, 23 desa di Kecamatan Peulimbang dengan status desa tertinggal dan sangat tertinggal, serta Kecamatan Peudada tercatat memiliki sebanyak 49 desa, yang sebagian besar berstatus tertinggal dan sangat tertinggal. SKP selanjutnya adalah SKP 2 dengan luas 7.975 Ha yang mencakup Kecamatan Samalanga, Kecamatan Simpang Mamplam, dan sebagian Kecamatan Pandrah. SKP 2 terdiri dari 108 desa dengan status berkembang, tertinggal, dan sangat tertinggal. Pusat dari SKP 2 terletak di Desa Meunasah Mamplam Kecamatan Simpang Mamplam. SKP 3 memiliki luas 17.987,51 ha yang terletak di sebagian Kecamatan Pandrah and Kecamatan Jeunieb. SKP 3 memiliki 49 desa yang sebagian besar memiliki status tertinggal dan sangat tertinggal. Adapun pusat SKP 3 terletak di Desa Keude Jeunieb Kecamatan Jeunieb.



Gambar 3 Kawasan Transmigrasi Harus Muda Jaya.

Kegiatan Ekspedisi Patriot pada periode kali ini berfokus pada tiga Satuan Kawasan Pengembangan (SKP), yaitu SKP 1, SKP 2, dan SKP 3. Namun, fokus lokus kegiatan hanya mencakup dua SKP, yaitu SKP 1 di Kecamatan Peudada dan SKP 2 di Kecamatan Simpang Mamplam. Setiap SKP terdiri atas beberapa Unit Permukiman Transmigrasi (UPT), yaitu satuan wilayah permukiman yang menjadi bagian dari kawasan transmigrasi. Fokus utama kegiatan ini adalah melakukan analisa dan pengembangan komoditas unggulan daerah pada sejumlah desa terpilih yang termasuk dalam kawasan transmigrasi. Desa-desanya meliputi tiga UPT, yaitu UPT Cot Kruet terdiri dari Desa Cot Kruet dan Desa Jaba di Kecamatan Peudada, UPT Lhok Tanoh/Krueng Meuseugob terdiri dari Desa Lhok Tanoh, Desa Krueng Meuseugob, Desa Menasah Dayah dan Desa Ie Rhob Timu serta UPT Bukit Cerana yang terdiri dari Desa Ie Rhob Babah Lueng, Desa Ie Rhob Timu dan Desa Glee Meundong di Kecamatan Simpang Mamplam. Ketiga UPT tersebut ditetapkan sebagai lokasi pengembangan karena memiliki potensi sumber daya dan komoditas yang dinilai strategis untuk dikembangkan lebih lanjut.

Sektor perkebunan memiliki peran strategis sebagai penopang ekonomi jangka panjang di kawasan ini. Komoditas unggulan seperti kelapa dalam, kelapa sawit, pinang, dan karet menjadi sumber pendapatan utama bagi para petani, dengan prospek pengembangan hilirisasi dan ekspor yang menjanjikan. Perkebunan tersebut tersebar di berbagai kecamatan, antara lain Peudada, Peulimbang, dan Simpang Mamplam, yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan lebih lanjut melalui penguatan rantai nilai dan pengembangan industri pengolahan.

Sementara itu, sektor perikanan merupakan motor penggerak ekonomi di kawasan pesisir, khususnya di wilayah Samalanga dan Jeunieb. Komoditas unggulan seperti udang windu dan *vannamei*, bandeng, kerapu, serta nila memiliki orientasi pemasaran baik ke pasar ekspor maupun domestik dengan daya saing harga yang tinggi. Potensi komoditas perikanan ini dapat berperan sebagai lokomotif ekspor kawasan apabila didukung oleh infrastruktur tambak yang memadai, fasilitas pengolahan hasil yang memadai, serta akses pasar yang optimal.

Secara keseluruhan, kombinasi keempat sektor tersebut menunjukkan potensi besar untuk memperkokoh ketahanan ekonomi lokal sekaligus mendorong transformasi kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang berlandaskan pada pengembangan komoditas unggulan. Strategi pengembangan yang fokus pada komoditas-komoditas ini diharapkan dapat memberikan efek multiplikasi positif terhadap aktivitas perdagangan, pengembangan industri skala kecil, dan peningkatan lapangan kerja di kawasan Harus Muda Jaya.



Gambar 4 PT Syaukath Sejahtera yang berlokasi di Kecamatan Gandapura.

Dalam konteks Kabupaten Bireuen, terdapat dua PKS utama yang berfungsi sebagai pusat pengolahan hasil kelapa sawit, yakni PT Syaukath Sejahtera yang berlokasi di Kecamatan Gandapura dengan jarak sekitar 33 kilometer dari lokasi studi (Gambar 4), serta PT Blang Ketumba yang berada di Kecamatan Juli, sekitar 47 kilometer dari lokasi studi. Hasil kunjungan dan pengamatan lapangan menunjukkan bahwa sekitar 80% pasokan TBS untuk PT Syaukath Sejahtera berasal dari kebun masyarakat, sedangkan sisanya berasal dari kebun milik pribadi ataupun perusahaan. Kondisi ini mengindikasikan potensi yang signifikan bagi kebun-kebun sawit di wilayah studi sebagai sumber utama pasokan TBS bagi PKS tersebut.

Dengan tersebarnya kebun kelapa sawit di setiap Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) dan peran aktif pengepul hasil sawit, terdapat peluang besar untuk memaksimalkan pemanfaatan hasil panen masyarakat melalui saluran distribusi yang mengarah ke kedua PKS utama di Kabupaten Bireuen. Meskipun jarak kedua pabrik ini relatif jauh dari lokasi UPT, yaitu antara 33 hingga 47 kilometer, hubungan pasokan hasil perkebunan ke PKS di tingkat kabupaten tetap menjadi mekanisme utama dalam pengelolaan dan pemanfaatan hasil kelapa sawit di kawasan ini. Hingga saat ini, belum tersedia industri pengolahan sawit di tingkat UPT,

sehingga PT Syaukath Sejahtera dan PT Blang Ketumba menjadi pusat utama bagi pengolahan hasil kelapa sawit masyarakat transmigran di wilayah tersebut.

4.4 | Focus Group Discussion

Identifikasi komoditas unggulan pada Kawasan Transmigrasi Harus Muda Jaya dilakukan melalui serangkaian tahapan yang sistematis. Prosesnya dimulai dengan pengumpulan data sekunder melalui dokumen perencanaan daerah, data statistik pertanian, peta penggunaan lahan, informasi agroklimat, serta laporan teknis yang memberikan gambaran awal potensi wilayah. Tahap berikutnya adalah survei lapangan dan wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan kepala kawasan, tokoh masyarakat, penyuluh pertanian, kelompok tani, serta warga transmigran untuk memahami kondisi aktual, pengalaman budidaya, dan tantangan yang dihadapi. Analisis kesesuaian lahan dan iklim kemudian dilakukan untuk mengkaji kecocokan jenis tanah, curah hujan, sumber air, topografi, dan musim tanam terhadap komoditas potensial. Proses ini dilanjutkan dengan analisis sosial dan budaya yang menilai minat masyarakat, pengetahuan lokal, pengalaman budidaya, dan nilai-nilai yang memengaruhi penerimaan masyarakat terhadap suatu komoditas.

Selain itu, analisis ekonomi dan rantai nilai dilakukan untuk melihat peluang pasar, nilai tambah, stabilitas harga, potensi hilirisasi, serta hubungan antar pelaku dalam rantai pasok. Analisis ini diperkuat dengan penilaian terhadap infrastruktur dan kelembagaan, seperti ketersediaan jalan, irigasi, listrik, gudang, serta dukungan penyuluh, kelompok tani atau koperasi, dan kebijakan OPD terkait. Hasil dari seluruh analisis tersebut digunakan untuk menyusun penilaian prioritas komoditas melalui matriks yang mempertimbangkan aspek teknis, sosial-budaya, ekonomi, lingkungan, dan kebijakan. Tahap berikutnya adalah validasi dan konfirmasi melalui FGD bersama OPD, tokoh masyarakat, dan pelaku usaha untuk memastikan komoditas terpilih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan kawasan (Gambar 5).



Gambar 5 FGD bersama OPD, tokoh masyarakat, dan pelaku usaha.

4.5 | Penguatan Kelembagaan Koperasi dan Kelompok Tani

Penguatan tata kelola kelembagaan merupakan intervensi cepat yang berdampak besar pada akses petani terhadap pasar *input* dan *output*. Langkah-langkah prioritas meliputi revitalisasi koperasi UPT, transparansi mekanisme harga, dan perumusan SOP penjualan kolektif. Institusi lokal yang aktif terbukti mampu menurunkan biaya transaksi pertanian hingga 20%^[16]. Dalam konteks kawasan Harus Muda Jaya di Aceh, penguatan kelembagaan ini tidak sekadar berorientasi pada efisiensi manajerial, tetapi juga merupakan manifestasi dari ekosistem ekonomi syariah yang diintegrasikan ke dalam tiga dimensi utama:

Pertama, Inklusi Keuangan Syariah dan Keadilan Ekonomi. Pengembangan BUMG dan Koperasi diarahkan untuk mengadopsi prinsip ekonomi berkeadilan melalui sistem kemitraan yang transparan dan bebas dari praktik spekulasi (*gharar*) dalam penentuan harga TBS. Implementasi sistem syariah yang berlaku di Aceh menjadi landasan bagi kelembagaan petani untuk memastikan bahwa setiap transaksi melalui akad-akad yang jelas (seperti *mudharabah* atau *musyarakah*) memberikan kemaslahatan bagi seluruh anggota.

Kedua, Integritas Produk Halal dari Hulu. Kelembagaan yang kuat diposisikan sebagai motor penggerak industri produk halal di tingkat hulu. Hal ini menjamin bahwa seluruh proses produksi kelapa sawit memenuhi kriteria *halalan toyyiban*, sehingga produk turunan sawit dari kawasan ini memiliki standar integritas tinggi yang siap masuk ke rantai pasok industri halal global.

Ketiga, Pelestarian Lingkungan sebagai Tanggung Jawab Ekologis. Sejalan dengan prinsip *Maqasid al-Shari'ah* dalam menjaga alam, penguatan kelembagaan ini juga mencakup standarisasi praktik budidaya yang ramah lingkungan. Hal ini mencakup:

- Penerapan praktik budidaya yang menjaga kelestarian sumber daya alam dan keanekaragaman hayati.
- Pengelolaan limbah produksi sawit yang ramah lingkungan untuk mendukung keberlangsung ekosistem.
- Mitigasi risiko ekologis akibat pembukaan lahan guna memastikan bahwa aktivitas ekonomi tidak merusak daya dukung lingkungan bagi generasi mendatang.

Dengan mengintegrasikan aspek produk halal, keuangan syariah, dan pelestarian lingkungan, penguatan kelembagaan di Harus Muda Jaya tidak hanya meningkatkan posisi tawar petani terhadap PKS regional, tetapi juga menciptakan model pembangunan kawasan transmigrasi yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.

4.6 | Perbandingan Harga Sederhana antara Penjualan Kelapa Sawit kepada Pengepul Versus Pengelolaan Mandiri oleh BUMG/ Koperasi Desa

Pada skema saat ini, petani menjual TBS kepada pengepul dengan harga berkisar antara Rp 2.200 hingga Rp 2.600 per kilogram, sementara pengepul kemudian menjualnya ke PKS dengan harga Rp 2.500 hingga Rp 2.900 per kilogram, sehingga terdapat margin sekitar Rp 300 per kilogram yang dinikmati oleh pengepul. Kondisi ini menyebabkan petani hanya menerima harga yang lebih rendah, tanpa transparansi harga yang memadai, serta berada pada posisi tawar yang lemah sebagai *price taker*, yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya nilai tambah yang diterima petani, yaitu hanya sekitar 5–12%.

Pada skema usulan, petani tidak lagi menjual TBS melalui pengepul, melainkan melalui kelembagaan kolektif seperti BUMG atau koperasi yang terhubung langsung ke PKS. Dalam skema ini, harga jual TBS mengikuti harga di tingkat PKS, yaitu berkisar antara Rp 2.500 hingga Rp 2.900 per kilogram. Setelah dikurangi biaya operasional kolektif, seperti transportasi dan bongkar muat yang diperkirakan sekitar Rp 100 hingga Rp 150 per kilogram, harga bersih yang diterima petani berada pada kisaran Rp 2.350 hingga Rp 2.750 per kilogram. Skema ini menunjukkan adanya peningkatan penerimaan di tingkat petani sekaligus memperbaiki posisi tawar melalui mekanisme penjualan kolektif yang lebih transparan dan terkoordinasi.

Dalam skema berbasis BUMG atau koperasi, biaya distribusi dan angkutan tidak lagi menjadi margin yang sepenuhnya dinikmati oleh pengepul, melainkan bertransformasi menjadi sumber pendapatan kelembagaan lokal. Hal ini menciptakan mekanisme *value retention* di tingkat komunitas, di mana sebagian nilai ekonomi tetap berputar di dalam kawasan transmigrasi. Selain itu, kelembagaan tidak hanya berfungsi sebagai agregator ekonomi, tetapi juga sebagai aktor strategis dalam pembinaan petani. Peran ini mencakup penguatan praktik budidaya ramah lingkungan serta peningkatan literasi halal sebagai bagian dari integrasi ekosistem syariah. Dengan demikian, BUMG atau koperasi berperan sebagai institusi multifungsi yang tidak hanya meningkatkan efisiensi rantai nilai, tetapi juga memastikan keberlanjutan ekonomi, sosial, dan ekologis secara simultan.

Perbandingan antara skema saat ini dan skema usulan tersebut selanjutnya dirangkum secara lebih sistematis pada Tabel 2 untuk menunjukkan perbedaan harga, distribusi margin, dan implikasi terhadap nilai tambah yang diterima petani.

Tabel 2 Perbandingan Harga Sederhana antara Penjualan Kelapa Sawit kepada Pengepul Versus ke Kelembagaan Petani

Komponen	Pengepul	BUMG/Koperasi
Harga diterima petani (Rp/kg)	Rp. 2.200,- s.d Rp. 2.600,-	Rp. 2.350,- s.d Rp. 2.750,-
Selisih keuntungan	-	+ Rp 150 – 300/kg
Distribusi margin	Terkonsentrasi pada pengepul	Terdistribusi ke petani & kelembagaan lokal
Transparansi harga	Rendah	Lebih tinggi (kolektif & terbuka)
Posisi tawar petani	Lemah (<i>price taker</i>)	Lebih kuat (<i>collective bargaining</i>)
Nilai tambah petani	Rendah	Meningkat
Biaya distribusi & angkutan	Dikuasai pengepul	Menjadi sumber pendapatan BUMG/Koperasi
Fungsi kelembagaan	Tidak ada	Agregator, negosiasi, dan pengelola logistik
Pembinaan petani	Tidak terstruktur	Terintegrasi (lingkungan & literasi halal)

Sumber: Data diolah, 2025

4.7 | Desain Pengembangan Komoditas

Temuan lapangan pada kegiatan pengabdian ini memperkuat argumen pada bagian pendahuluan bahwa kegagalan pengembangan kawasan transmigrasi bukan disebabkan oleh keterbatasan potensi, tetapi oleh kegagalan sistem dalam mengelola distribusi nilai dan koordinasi antar aktor. Ini menunjukkan bahwa pendekatan berbasis produksi yang dominan selama ini belum mampu menjawab persoalan ketimpangan manfaat ekonomi dan keberlanjutan. Hasil studi ini menegaskan bahwa keberadaan komoditas unggulan seperti kelapa sawit hanya merupakan kondisi awal (*necessary condition*), namun tidak cukup tanpa perbaikan struktur tata niaga dan kelembagaan.

Secara empiris, temuan lapangan menunjukkan adanya *coordination failure* dalam rantai nilai, ditandai oleh dominasi pengepul, asimetri informasi harga, dan terbatasnya akses petani ke PKS. Dalam perspektif rantai nilai global, kondisi ini mencerminkan ketidakseimbangan relasi kekuasaan antar aktor yang menyebabkan distribusi manfaat cenderung terpusat pada aktor hilir^[17]. Studi terbaru juga menunjukkan bahwa tanpa intervensi kelembagaan, integrasi petani kecil ke dalam rantai nilai seringkali bersifat eksklusif dan tidak meningkatkan kesejahteraan secara signifikan^[18].

Desain pengembangan komoditas yang diusulkan dalam studi ini berupaya mengoreksi kegagalan tersebut melalui pendekatan sistemik berbasis tahapan, sebagaimana dirangkum dalam Gambar 6. Alur tersebut menegaskan bahwa transformasi ekonomi memerlukan integrasi antara data, analisis, dan validasi sosial sebagai dasar *evidence-based coordination*. Pendekatan ini sejalan dengan temuan dalam literatur pembangunan wilayah yang menekankan pentingnya koordinasi antar aktor dan institusi dalam menciptakan sistem ekonomi yang inklusif^[19].

Lebih lanjut, temuan lapangan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini menempatkan akses ke PKS sebagai titik kritis dalam restrukturisasi rantai nilai. Akses ini menentukan efisiensi distribusi sekaligus posisi tawar petani dalam sistem pasar. Tanpa intervensi pada titik ini, peningkatan produksi berpotensi memperkuat ketimpangan struktural. Hal ini konsisten dengan temuan bahwa keterhubungan pasar (*market access*) merupakan determinan utama dalam meningkatkan pendapatan petani kecil dan mengurangi ketimpangan^[20, 21].

Selain itu, penguatan kelembagaan petani menjadi elemen kunci dalam desain ini. Tanpa organisasi kolektif, mekanisme penjualan kolektif dan transparansi harga sulit diwujudkan. Literatur menunjukkan bahwa kelembagaan seperti koperasi berperan penting dalam meningkatkan efisiensi koordinasi, akses pasar, dan daya tawar petani^[22, 23]. Dengan demikian, kelembagaan tidak hanya berfungsi administratif, tetapi sebagai mekanisme strategis dalam redistribusi nilai.

Secara keseluruhan, hasil dan diskusi ini menegaskan bahwa pengembangan komoditas harus dipahami sebagai proses rekonstruksi sistem distribusi nilai, bukan sekadar peningkatan produksi. Desain yang dihasilkan berkontribusi secara konseptual dengan menunjukkan bahwa keberhasilan pengembangan kawasan bergantung pada kemampuan untuk mengatasi *coordination failure* melalui penguatan kelembagaan, peningkatan akses pasar, dan restrukturisasi rantai nilai secara sistemik.



Gambar 6 Desain pengembangan komoditas dengan pendekatan sistemik berbasis tahapan.

5 | KESIMPULAN DAN SARAN

Transmigrasi tetap relevan sebagai instrumen pembangunan wilayah di Indonesia, namun memerlukan transformasi paradigma dari pendekatan berbasis relokasi menuju pembangunan kawasan yang berkelanjutan dan berbasis sistem ekonomi lokal. Keberhasilan transmigrasi tidak lagi diukur dari jumlah penduduk yang dipindahkan, melainkan dari kemampuan kawasan dalam menciptakan keseimbangan antara keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dalam konteks Harus Muda Jaya, tantangan utama tidak terletak pada potensi komoditas, tetapi pada struktur tata niaga dan kelembagaan yang belum mampu mengoptimalkan distribusi nilai. Ketergantungan terhadap pengepul, penjualan TBS dalam bentuk mentah, keterbatasan infrastruktur produksi, serta risiko perubahan iklim menunjukkan bahwa sistem yang ada masih bersifat rentan dan tidak efisien.

Oleh karena itu, arah pengembangan kawasan perlu difokuskan pada penguatan kelembagaan petani sebagai fondasi utama transformasi ekonomi. Penguatan kelompok tani, koperasi, dan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) menjadi prasyarat agar petani mampu meningkatkan posisi tawar, mengakses pasar secara langsung, serta membangun sistem tata niaga yang lebih transparan dan berkeadilan.

Sebagai tindak lanjut, beberapa rekomendasi kebijakan teknis yang dapat diimplementasikan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Bireuen

- Penguatan kelembagaan berbasis wilayah melalui fasilitasi pembentukan koperasi/BUMG agregator TBS yang berfungsi sebagai *off-taker* lokal, termasuk dukungan legalitas, pelatihan manajemen, dan pendampingan operasional.
- Pengembangan skema penjualan kolektif dengan menetapkan mekanisme harga referensi berbasis transparansi (misalnya mengacu pada harga provinsi), serta integrasi sistem informasi harga berbasis digital sederhana (*WhatsApp gateway/dashboard* desa).
- Perbaikan infrastruktur produksi dan distribusi, khususnya jalan usaha tani dan akses ke PKS, sebagai intervensi prioritas untuk menurunkan biaya logistik dan meningkatkan efisiensi rantai pasok.
- *Pilot project* kemitraan langsung dengan PKS, difasilitasi oleh pemerintah daerah, dengan skema kontrak yang transparan dan berbasis syariah serta prinsip keadilan (misalnya pembagian margin yang jelas dan sistem *grading* terbuka).
- Program literasi tata niaga dan keuangan petani, termasuk pencatatan usaha, pemahaman struktur harga, serta penguatan kapasitas negosiasi kolektif.

2. Kementerian Transmigrasi / Pemerintah Pusat

- Reorientasi kebijakan transmigrasi berbasis komoditas unggulan dan rantai nilai, bukan hanya pembukaan lahan, dengan menjadikan penguatan kelembagaan sebagai indikator kinerja utama.
- Pengembangan model kawasan transmigrasi terintegrasi (*cluster-based development*) yang menghubungkan produksi, pengolahan, dan pasar dalam satu sistem yang terkoordinasi.
- Fasilitasi akses pembiayaan inklusif berbasis kelembagaan, seperti skema pembiayaan koperasi/BUMG untuk investasi logistik (transportasi TBS, gudang, dll.).
- Integrasi sistem *traceability* dan digitalisasi data petani, sebagai dasar transparansi rantai pasok dan peningkatan akses ke pasar yang lebih luas, termasuk industri hilir berbasis halal.
- Penguatan regulasi kemitraan petani–industri, dengan standar minimum terkait transparansi harga, kualitas, dan pembagian keuntungan untuk mencegah praktik yang merugikan petani.

Secara keseluruhan, rekomendasi ini menegaskan bahwa transformasi kawasan transmigrasi memerlukan intervensi yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga struktural. Penguatan kelembagaan, perbaikan akses pasar, dan dukungan kebijakan yang terintegrasi menjadi kunci dalam menciptakan sistem ekonomi yang lebih inklusif, efisien, dan berkelanjutan di kawasan transmigrasi.

6 | UCAPAN TERIMA KASIH

Kegiatan ini didukung oleh Ekspedisi Transmigrasi Patriot, Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia, dengan nomor hibah terdaftar: 3512/PKS/ITS/2025. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan bantuan yang telah sangat memudahkan penyelesaian kegiatan ini.

Referensi

1. OJK, Roadmap for the Development and Strengthening of Indonesian Islamic Banking 2023-2027; 2023.
2. Islamiati SR, Winarto Y, FEB UI Soroti Tantangan dan Strategi Penguatan Ekonomi Syariah Indonesia Menuju OECD; 2025.
3. Dwi Utami A, Alfi M. Tantangan Masyarakat Transmigran dalam Pelaksanaan Program Transmigrasi di UPT Durian Amparan Kabupaten Bengkulu Utara. *Jurnal Georafflesia* 2022;p. 243–257.
4. Daniarta Sukarno T, Aldha N, Siregar M, Yustina F. Transpolitan: Kebijakan Pembangunan Transmigrasi Masa Depan. *Jurnal Kebijakan Publik* 2023;14.
5. Karim MR, Dulal M, Sakila F, Aditi P, Smrity SJ, Asha NN. Analyzing the factors influencing sustainable supply chain management in the textile sector. *Cleaner Logistics and Supply Chain* 2024;13.
6. Franciosi LM. Islamic Finance and Sustainable Development: Key Ethical Features and Proactive Initiatives Promoting Financial Inclusion. *European Journal of Islamic Finance* 2024;p. 2421–2172.
7. Alpay S, Haneef MA. Integration of waqf and Islamic microfinance for poverty reduction: case studies of Malaysia, Indonesia and Bangladesh. *The Statistical, Economic and Social Research and Training Centre for Islamic Countries (SESRIC)*; 2015.
8. Rejeb A, Rejeb K, Zailani S, Treiblmaier H, Hand KJ. Integrating the Internet of Things in the halal food supply chain: A systematic literature review and research agenda. *Internet of Things* 2021;13.
9. Alfadhly NKZ, Al-Temimi AA, Alkanan ZT, Altemimi AB, Younis IM, Giuffrè AM, et al. SUSTAINABLE AGRICULTURE DEVELOPMENT FOR FOOD SAFETY AND NUTRITION. *Food Systems* 2024;7(3):491–504.
10. McNeish Taormina R, Massey T, Walker-Egea C, Sowell C, Rigg KK, Simmons C, et al. Building capacity to create community change (BC4): A model to support successful program planning and implementation. *Evaluation and Program Planning* 2023;97.
11. Baka WK, Rianse IS, la Zulfikar Z. Palm Oil Business Partnership Sustainability through the Role of Social Capital and Local Wisdom: Evidence from Palm Oil Plantations in Indonesia. *Sustainability* 2024;16(17):7541.
12. Gundumogula M. Importance of Focus Groups in Qualitative Research. *The International Journal of Humanities & Social Studies* 2020;8(11).
13. Kelly MM, Martin-Peters T, Farber JS. Secondary Data Analysis: Using existing data to answer new questions. *Journal of Pediatric Health Care* 2024;38(6):615–618.
14. Webster J, Watson RT. Analyzing the Past to Prepare for the Future: Writing a Literature Review. *MIS Quarterly* 2002;26(1):1–10.
15. sipukat transmigrasi go id, sipukat 2025; 2025. Accessed: 2026-04-21. <https://sipukat.transmigrasi.go.id/>.
16. He Y, Chen Y. The Impact of Agricultural Cooperatives on Farmers' Agricultural Revenue: Evidence from Rural China. *Sustainability* 2024;16(24):10979.
17. Dallas MP, Ponte S, Sturgeon TJ. Power in global value chains. *Review of International Political Economy* 2019;26(4):666–694.
18. Barrett CB, Reardon T, Swinnen J, Zilberman D. Agri-food Value Chain Revolutions in Low- and Middle-Income Countries. *Journal of Economic Literature* 2022;60(4):1316–1377.
19. Rodríguez-Pose A. Institutions and the fortunes of territories. *Regional Science Policy & Practice* 2020;12(2):371–386.

20. Liverpool-Tasie LSO, Omonona BT, Sanou A, Ogunleye WO. Is increasing inorganic fertilizer use for maize production in SSA a profitable proposition? Evidence from Nigeria. *Food Policy* 2017;67:41–51.
21. Villalba R, Venus TE, Sauer J. The ecosystem approach to agricultural value chain finance: A framework for rural credit. *World Development* 2023;164.
22. Grashuis J, Ye SU. A review of the empirical literature on farmer cooperatives: Performance, ownership and governance, finance, and member attitude. *Annals of Public and Cooperative Economics* 2019;90(1):77–102.
23. Chen Z, Meng Q, Xu R, Guo X, Cai C. How rural financial credit affects family farm operating performance: An empirical investigation from rural China. *Journal of Rural Studies* 2022;91:86–97.

Cara mengutip artikel ini: Dwitawati, I., Miyagi, F., Isnaini, A. S., Khirnica, K., Putra, R. S., Gunawan, S., (2026), Penguatan Kelembagaan Petani dalam Mendukung Pengembangan Kelapa Sawit di Kawasan Transmigrasi Harus Muda Jaya, *Sewagati*, 10(3):472–488, <https://doi.org/10.12962/j26139960.v10i3.8969>.